

**ANALISIS PENGARUH *AUDIT TENURE*,
STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN
UKURAN KAP TERHADAP INTEGRITAS
LAPORAN KEUANGAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

TIA ASTRIA
NIM. C2C607140

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Tia Astria
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607140
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *AUDIT
TENURE, STRUKTUR
CORPORATE GOVERNANCE,
UKURAN KAP TERHADAP
INTEGRITAS LAPORAN
KEUANGAN***

Dosen Pembimbing : M.Didik Ardiyanto, S.E, M.Si, Akt

Semarang, 10 Juni 2011
Dosen Pembimbing,

(M.Didik Ardiyanto, S.E, M.Si, Akt)
NIP. 19660616 199203 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Tia Astria
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607140
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *AUDIT TENURE*,
STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE,
DAN UKURAN KAP TERHADAP
INTEGRITA LAPORAN KEUANGAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Juni 2011

Tim Penguji

1. M.Didik Ardiyanto, S.E, M.Si, Akt (.....)
2. Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si, Akt (.....)
3. Wahyu Meiranto, S.E, M.Si, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Tia Astria, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh *Audit Tenure*, Struktur *corporate governance*, dan Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

Tia Astria

NIM : C2C607140

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *audit tenure*, struktur *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen) dan ukuran KAP terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Integritas laporan keuangan didefinisikan sebagai sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit tenure*, struktur *corporate governance* yang dianalisis dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP terhadap integritas laporan keuangan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan yang dianalisis oleh konservatisme, pada tahun pengamatan dari 2007-2009.

Sampel dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode antara 2007-2009. Data yang dikumpulkan dengan metode purposive sampling. Total 105 perusahaan ditentukan sebagai sampel. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen) dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu, *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Kata Kunci : Integritas laporan keuangan, *Audit Tenure*, *Corporate Governance*, Ukuran KAP

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of audit tenure, structure corporate governance (institutional ownership, manajerial ownership, audit committee, independent commissioner) and KAP Size to integrity of financial statement at the manufacturer companies in Indonesia. Integrity of financial statement define as how far a financial statement disclosure shows truth and honest information. Independent variables used in this study were audit tenure, structure corporate governance was analyzed by institutional ownership, manajerial ownership, audit committee, independent commissioner, and KAP size to integrity of financial statement. Dependent variable used in this study is integrity of financial statement was analyzed by conservatism, year observation from 2007-2009.

Study's sample was manufacturer companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) period among 2007-2009. Data was collected by purposive sampling method. Total 105 manufacturer companies were taken as study's sample. The method of analysis of this research used logistic regression.

The results of this research showed that structure corporate governance (institutional ownership, manajerial ownership, audit committee, independent commissioner) and KAP Size had significant effect to integrity of financial statement. Meanwhile, audit tenure had not significant effect to integrity of financial statement.

Keywords: *Integrity of financial statement, Audit Tenure, Corporate Governance, Size KAP.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan mengubah nasib seseorang apabila mereka tidak mengubah nasibnya sendiri” (QS. Ar-Raq: 11)

“...Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Al-Insyiroh: 6-8)

*“Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat benda terkecil pun, maka dia akan melihat (balasan)nya”
(QS. Az-Zalzalah: 7)*

“Positive Thinking and Do The Best”

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Skripsi ini aku persembahkan untuk mama papa tercinta atas segala doa, nasihat, dukungan dan semangatnya.
- Adikku tersayang Asti Wulandari dan Prayoga Susanto (alm).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH *AUDIT TENURE*, *STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE*, DAN UKURAN KAP TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN,”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (SI) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. M. Didik Ardiyanto, S.E, M.Si, Akt. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberi bimbingan dan masukan, juga doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si, Akt selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis.
4. Bapak Sudarno selaku Ketua Jurusan Akuntansi Reguler 2.
5. Seluruh dosen Akuntansi Reguler 2 atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
6. Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
7. Adikku tersayang Asti Wulandari dan Prayoga Susanto (alm) atas semangat dan dukungannya, serta keceriaannya yang memberikan saya inspirasi.
8. Terima kasih juga untuk Kakek dan Eyang Ti atas segala nasihat dan dukungan doa selama ini.
9. Sahabat dan partner terbaikku Faizal Nurrochman yang selalu mendoakan, mendukung, dan mengajarkan kesabaran kepada saya.

10. Sahabat terbaikku: Rida, Anggi, Della, Sawitri, Jeni, Bunda Nyta, Nina, Zizah, Ella, Liya, Phita, Tito, Ageng, Dhema, Glifandi, Dwi F, Tri Gunawan, Dewa, Intan, terimakasih atas segala bentuk persahabatan selama 3 tahun ini, dukungan, bantuan, doa dan semangat dari kalian. Semoga persahabatan kita tetap terjaga. I love you all guys ☺.
11. Teman-teman Akuntansi Reguler 2 kelas B angkatan 2007, atas kebersamaan, kerjasama yang baik, bantuan, dan semangatnya. Semoga selalu kompak.
12. Keluarga KKN “Harjowinangun” (uke, putri, karina, maya, mbak yanti, oca, mami yudith, evi, agung, ian, septian, agil, udin, emil, mas adam, dan bondan) kalian memberikan warna tersendiri dalam hidup saya.
13. Yolis, Riska, Sasa, Ayu, Tegar, Frysa, Irnanda, Gugi terima kasih atas doa dan dukungannya.
14. Mas Imam, Pak Shiddiq sebagai staf TU yang selalu membantu saya dan memberikan saya nasihat-nasihat selama menjalankan perkuliahan dan mempersiapkan sidang. Terima kasih banyak
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
Amin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 10 Juni 2011

Tia Astria

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori <i>agency</i>	13
2.1.2 Auditing dan Akuntan Publik	15
2.1.3 Integritas Laporan Keuangan	20
2.1.3.1 Konservatisme Akuntansi	22
2.1.4 <i>Audit tenure</i> dan Integritas Laporan Keuangan	26
2.1.5 Struktur <i>corporate governance</i> dan Integritas Laporan Keuangan	29

2.1.5.1 Kepemilikan Intitusional dan Integritas Laporan Keuangan.....	30
2.1.5.2 Kepemilikan Manajerial dan Integritas Laporan Keuangan.....	31
2.1.5.3 Komite Audit dan Integritas Laporan Keuangan	32
2.1.5.4 Komisaris Independen dan Integritas Laporan Keuangan	34
2.1.6 Ukuran KAP dan Integritas Laporan Keuangan	36
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Pemikiran.....	42
2.4 Hipotesis.....	45
2.4.1 Pengaruh <i>audit tenure</i> terhadap Integritas Laporan Keuangan	45
2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan.....	47
2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan	48
2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan	49
2.4.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan	50
2.4.6 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	52
3.1.1 Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan	52
3.1.2 Variabel Independen :	53
3.1.2.1 <i>Audit Tenure</i>	54
3.1.2.2 Struktur <i>Corporate Governance</i>	54
3.1.2.3 Ukuran KAP	56

3.2 Penentuan Sampel dan Populasi	57
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	58
3.4 Metode Pengumpulan Data	58
3.5 Metode Analisis.....	59
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	59
3.5.2 Uji Multikolonieritas	60
3.5.3 Uji Hipotesis	61
3.5.4 Menilai Keseluruhan Model.....	62
3.5.5 Menguji Kelayakan Model Regresi.....	63
3.5.6 Estimasi Parameter dan Intepretasinya	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	64
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	65
4.2.1 Masa Perikatan <i>Tenure</i> Perusahaan	66
4.2.2 Kepemilikan Saham Institusional.....	67
4.2.3 Kepemilikan Saham Manajerial	68
4.2.4 Komite Audit	69
4.2.5 Komisaris Independen	69
4.2.6 Ukuran KAP.....	70
4.3 Analisis Data.....	71
4.3.1 Identifikasi Multikolonieritas.....	72
4.3.2 Uji <i>Goodness of Fit Model</i>	73
4.3.3 Uji <i>Overall fit test</i>	74
4.3.4 Koefisien Determinasi	75
4.3.5 Model Regresi Logistik	76
4.3.6 Uji Hipotesis	79
4.3.7 Tabel Klasifikasi	82
4.4 Pembahasan Pengujian Hipotesis	82
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Keterbatasan	91

5.3 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN - LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu..... 40
Tabel 4.1	Hasil Seleksi Sampel Penelitian 64
Tabel 4.2	Konservatisme Akuntansi..... 65
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Variabel <i>Audit Tenure</i> 67
Tabel 4.4	Statistik Deskriptif Variabel Kepemilikan Institusional..... 67
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif Variabel Kepemilikan Manajerial 68
Tabel 4.6	Statistik Deskriptif Variabel Komite Audit 69
Tabel 4.7	Statistik Deskriptif Variabel Komisaris Independen..... 69
Tabel 4.8	Statistik Deskriptif Variabel Ukuran KAP 70
Tabel 4.9	Korelasi Variabel Bebas 72
Tabel 4.10	Menguji Kelayakan Model Regresi..... 73
Tabel 4.11	Omnibus Test of Model Coeficient 75
Tabel 4.12	Koefisien Determinasi 76
Tabel 4.13	Hasil Uji Regresi Logistik 77
Tabel 4.14	Tabel Klasifikasi 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Model Kerangka Pemikiran	45
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel	98
Lampiran B Hasil SPSS	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (SAK, 2004). Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak. Dengan demikian, laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi.

Financial Accounting Standar Board (FASB) dalam *Statement of Financial Accounting Concept No.2* (SFAC NO.2) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi yang disediakan melalui pelaporan keuangan dan berbagai penjelasan yang digunakan sebagai laporan. Informasi akuntansi merupakan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal perusahaan sebagai pemegang saham, investor, kreditur, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya untuk menentukan kepentingan mereka terhadap perusahaan.

Pengukuran integritas informasi laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK, 2004) menetapkan karakteristik kualitatif yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Hedriksen and Van Breda (2000) mengemukakan beberapa karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan yaitu *cost and benefit*, *Relevance*, *Reliability*, *Comparability*, dan *Materiality*. Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan atau mengubah pengharapan para pengambil keputusan, dan informasi tersebut adalah reliabel apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai informasi bergantung pada informasi tersebut.

Mayangsari (2003) mendefinisikan integritas laporan keuangan sebagai berikut: “Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.” Sedangkan menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 2 kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan bias dan secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan. Ukuran integritas laporan keuangan secara intuitif diukur dengan konservatisme.

Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh *audit tenure*, struktur *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen dan ukuran KAP, terhadap integritas laporan keuangan. Pengukuran integritas laporan keuangan diukur dengan konservatisme akuntansi yaitu ditentukan dengan menggunakan asumsi-asumsi metode perusahaan yang digunakan yaitu antara lain metode penyusutan, metode depresiasi dan amortisasi, dan pengakuan biaya riset (Widya, 2005).

Konsep penggunaan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengakui, mengukur dan melaporkan nilai aktiva dan pendapatan

yang rendah, dan nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban (Jamaan, 2008). Mayangsari dan Wilopo (2002) dalam Widya (2005) menyatakan bahwa secara intuitif prinsip konservatisme bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksi kondisi mendatang yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme ini dapat menjadi salah satu faktor untuk mengurangi manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan integritas laporan keuangan.

Namun, pada kenyataannya saat ini banyak sekali terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi. Kasus-kasus ini telah meningkat beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan menyajikan informasi dalam laporan keuangan dengan tidak adanya integritas, dimana informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan. Kasus manipulasi akuntansi ini melibatkan sejumlah perusahaan besar di Amerika seperti Enron, Xerox, Tyco, Global Crossing, dan Worldcom maupun beberapa perusahaan di Indonesia seperti Kimia Farma dan Bank Lippo yang dahulunya mempunyai kualitas audit yang tinggi (Susiana dan Herawaty, 2007).

Salah satu contohnya pada kasus Enron, dimana perusahaan Enron melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas. Keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, auditor internal, sampai pada auditor eksternal

yang melibatkan KAP *big-five* Andersen, hal ini membuktikan bahwa kecurangan banyak dilakukan oleh orang-orang dalam (Susiana dan Herawaty, 2007)

Timbulnya kasus-kasus tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan bagi banyak pihak terutama terhadap tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai negara acuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, menjadi diragukan dengan merebaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi di negara tersebut. Di Indonesia, *corporate governance* sedang menjadi isu yang hangat. Terutama sejak terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia, dan semakin menjadi perhatian akibat banyak terungkapnya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan.

Faktor pertama yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah struktur *corporate governance*. Struktur *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007). Semakin baik penerapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan maka akan diharapkan mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat oportunistik sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas yang tinggi, yaitu laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

OECD (2005) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Menurut Frost dkk. (2002), perbaikan dalam praktik *corporate*

governance yang berkontribusi terhadap pengungkapan yang lebih baik dalam pelaporan bisnis, nantinya dapat memberikan fasilitas *market liquidity* dan *capital formation* yang lebih besar di pasar negara berkembang. Hal ini menunjukkan *corporate governance* mengatur pembagian tugas dan kewajiban yang berkepentingan terhadap perusahaan termasuk pemegang saham, komisaris, para manajer, dan *stakeholder*.

Sistem *corporate governance* sendiri memerlukan pengawasan pemegang saham dan tanggung jawab manajemen. Mekanisme pengawasan manajemen baik internal (berdasarkan organisasi) maupun eksternal (berdasarkan pasar) diwajibkan (Walsh & Seward, 1990). Dewan direksi atau komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif merupakan mekanisme pengawasan internal untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemilik. Disisi lain kepemilikan pihak luar, *monitoring debtholder*, peraturan pemerintah (perlindungan kepemilikan investor) merupakan mekanisme pengawasan eksternal yang membantu internal untuk pengawasan efektif perusahaan.

Selain dari pihak perusahaan, auditor eksternal (akuntan publik) sebagai pihak independen yang memberikan opini mengenai kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan mengenai kredibilitas akuntan publik sebagai pihak independen apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik (Susiana dan Arleen, 2007). Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham,

karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Fenomena skandal keuangan yang terjadi juga dapat menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Penyajian laba dalam laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang.

Faktor kedua yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu *audit tenure*. *Audit tenure* adalah lamanya jangka waktu pemberian jasa audit terhadap klien tertentu oleh suatu Kantor Akuntan Publik (Shockley, 1981). Sinason, *et al.* (2001) menemukan panjang masa perikatan audit secara positif dipengaruhi oleh jenis perusahaan audit. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan audit yang besar seperti Big 4 akan memiliki masa perikatan audit yang panjang dibandingkan perusahaan audit yang kecil seperti non big 4.

Perbedaan panjang masa perikatan audit antara kedua jenis perusahaan audit (Big 4 dan non Big 4) bisa mengganggu independensi auditor dalam jangka panjang. Flint (1988) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental mereka dan opini mereka. Salah satu ancaman yang dapat menghilangkan independensi auditor adalah masa perikatan audit yang panjang

(*audit tenure*). Karena masa perikatan audit yang panjang dapat menyebabkan auditor mengembangkan hubungan yang nyaman serta kesetiaan yang kuat atau emosional hubungan dengan klien mereka, yang bisa mencapai tahap di mana independensi auditor terancam. Mautz dan Sharaf (1961) dalam Nasser et al. (2006) percaya bahwa hubungan yang panjang antara auditor dan klien dapat menyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan independensinya.

Pada tahun 2007 sebanyak 856 AP dan 436 KAP sudah terkena sanksi, Hal ini dikarenakan banyak KAP melanggar Standar Profesional Akuntan Publik. Sanksi pembekuan izin selama masa waktu yang telah ditentukan dikenakan kepada AP Drs. Djoko Sutardjodari KAP Hertanto, Djoko, Ikah, Sutrisno, serta AP dari Petrus Mitra Winata yang berasal dari KAP Mitra Winata dan rekan karena melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan klien dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun (Detik Finance dalam *google.com*).

Beberapa sanksi juga telah dikenakan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2007, yang diantaranya dikenakan kepada KAP Drs. Anton Silalahi dan KAP Drs. H. Usman Saleh K yang mendapati sanksi pembekuan izin selama enam bulan karena tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha dan Keuangan KAP untuk beberapa tahun dimana sebelumnya juga telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 bulan (Antara News dalam *google.com*). Pengerjaan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Akuntan Publik (AP) serta Kantor Akuntan Publik (KAP) ini dipandang

sebagai tuntutan masyarakat terhadap profesi akuntan publik untuk meningkatkan kualitas jasa profesionalnya, khususnya jasa audit atas laporan keuangan dalam mempertahankan independensinya serta kualitas audit yang tinggi.

Faktor yang ketiga adalah pengaruh ukuran KAP terhadap integritas laporan keuangan. Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik dengan menggolongkannya ke dalam dua golongan yaitu *big four* dan *non-big four* (Arens, *et al*, 2003). Ukuran KAP mempengaruhi perusahaan untuk melakukan perpindahan auditor.

Beberapa penelitian sebelumnya, Kantor Akuntan Publik (KAP) *big* dan *non-big* (DeAngelo 1981; Palmorose 1988; Becker *et al.* 1998; Inten Meutia 2004) menunjukkan bahwa KAP *big four* akan berusaha menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP *non-big*. Namun demikian, kasus *Enron* cukup mengguncang ekonomi Amerika Serikat karena adanya keterlibatan salah satu KAP *big five* Arthur Andersen dalam kecurangan laporan keuangan.

Penelitian (Lennox 1999 dalam Riyatno 2007) melihat hubungan positif antara kualitas audit dan ukuran KAP berdasarkan dua hal, yang pertama adalah alasan reputasi dan yang kedua adalah alasan kekayaan (*deep pocket*) yang dimiliki oleh KAP besar. Penelitian ini membuktikan kesesuaian dengan hipotesis reputasi yang berargumen bahwa KAP besar mempunyai insentif yang lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan

yang lebih besar daripada KAP kecil, maka mereka terancam oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar pula bila mereka tidak menghasilkan laporan audit yang tidak akurat.

Timbulnya kasus kecurangan tersebut juga menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat pasar uang dan pasar modal. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang telah diberikan oleh KAP kepada pemakai. Jika pemakai merasa KAP memberikan jasa yang berguna dan berharga, maka nilai audit juga meningkat, sehingga KAP dituntut untuk bekerja dengan profesionalisme yang tinggi.

Dari uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul : **“ANALISIS PENGARUH *AUDIT TENURE*, STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN UKURAN KAP TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah dibahas diatas, maka untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari penetapan obyek yang akan diteliti, maka perumusan masalah akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Apakah *audit tenure* memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

2. Apakah struktur *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris apakah faktor *audit tenure*, struktur *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen) dan ukuran KAP berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Kegunaan Teoritis
 - Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan.
 - Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya dibidang pengauditan.

b) Kegunaan Praktik

- Penelitian ini menjadi dukungan bagi auditor agar senantiasa meningkatkan kualitas auditnya, dan menerapkan independesinya. Juga bagi manajemen perusahaan agar meningkatkan penerapan prinsip *corporate governance* di lingkungan perusahaannya.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan keahlian akuntan publik baik dari perspektif individu maupun profesi (pelatihan atau seminar) sehingga dapat meningkatkan pemahaman auditor terhadap karakteristik industri tertentu dan berdampak positif pada kualitas audit.
- Penelitian memberikan perusahaan untuk lebih memperhatikan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*).

Dengan adanya perkembangan perusahaan yang semakin besar maka sering terjadi konflik antara prinsipal dalam hal ini adalah para pemegang saham (*investor*) dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (*direksi*). Agen dikontrak melalui tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu manajer sudah seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna eksternal karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002). Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Baik pemilik maupun agen diasumsikan mempunyai rasionalisasi ekonomi dan semata mata mementingkan kepentingannya sendiri. Agen mungkin akan takut mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen dalam hal ini adalah akuntan publik. Tugas dari akuntan publik (auditor) memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh agen, dengan hasil akhir adalah opini audit.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. *Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) dalam Ujijantho dan Pramuka (2007), *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya.

2.1.2 Auditing dan Akuntan Publik

“Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the

company's internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making inquiries within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company's financial position and its activities during the period being audited.” (Whittington, et.al. dalam Agoes, 2001)

Adapun unsur-unsur dari auditing itu sendiri jika ditarik dari beberapa

pengertian di atas adalah:

1. Berupa laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya.
2. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis.
3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik.
4. Tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Menurut Mulyadi sebagaimana dikutip oleh Lina (2000), pengertian akuntan publik adalah:

“Akuntan Profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan, yang dibuat oleh kliennya dan juga yang menjual jasa sebagai konsultasi pajak, konsultasi di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.”

Akuntan publik diketahui masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Terdapat dua kepentingan yang menyebabkan profesi akuntan publik berkembang yaitu manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar serta pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang

diinvestasikan sehingga menuntut adanya peningkatan dan pengendalian mutu audit yang dilakukan.

Arens dan Loebbecke (2000), menyatakan bahwa sistem pengendalian mutu suatu KAP menetapkan dua belas unsur kendali mutu yang harus dipenuhi oleh kantor akuntan dalam melakukan profesinya, yaitu:

1. Independensi

Independensi merupakan kebijakan yang menetapkan bahwa kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa para auditor, pada semua tingkatan atau jenjang, mempertahankan independensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

2. Penugasan para auditor

Kebijakan ini ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para auditor yang telah mendapat latihan teknis dan keterampilan yang memadai yang sesuai dengan penugasan.

3. Konsultasi

Ditetapkan dengan maksud agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa auditor pada kantor akuntan publik akan meminta bantuan sepanjang diperlukan dari orang yang mempunyai pertimbangan yang lebih matang ataupun otoritas.

4. Supervisi

Kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan supervisi atas semua pekerjaan pada jenjang organisasi harus ditetapkan agar kantor akuntan publik

memperoleh keyakinan yang layak bahwa pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi norma pengendalian mutu yang ditentukan. Luas supervisi dan penelaahan yang tepat untuk suatu keadaan tergantung pada banyak faktor, termasuk kerumitan masalah yang dihadapi, kualifikasi auditor yang ditugasi, serta tersedia tidaknya dan dimanfaatkan tidaknya tenaga yang dapat memberikan konsultasi.

5. Pengangkatan auditor

Hal ini harus ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa auditor yang diangkat memiliki karakter yang sesuai sehingga mereka mampu melaksanakan tugas secara kompeten.

6. Pengembangan profesional

Ditetapkan dengan alasan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa para auditor memiliki pengetahuan yang diperlukan sehingga mereka mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

7. Promosi

Ditetapkan dengan alasan agar kantor akuntan publik dapat memperoleh keyakinan yang layak bahwa para auditor yang dipilih untuk dipromosikan telah memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab yang akan diserahkan padanya. Tata cara dalam mempromosikan auditor mempunyai pengaruh besar atas mutu pekerjaan suatu kantor akuntan publik.

8. Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien

Ditetapkan dalam menerima atau memelihara hubungan dengan klien, agar sejauh mungkin dihindarkan terlibatnya nama kantor akuntan tersebut dengan klien yang mempunyai itikad kurang baik.

9. Inspeksi

Ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa prosedur yang ada hubungannya dengan unsur pengendalian mutu lainnya telah ditetapkan secara selektif.

10. Pemerkejaan (*hiring*)

Ditetapkan oleh kantor akuntan publik untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu dan memberikan hasil kualitas yang baik.

11. Inspeksi

Ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa prosedur yang ada hubungannya dengan prosedur pengendalian mutu lainnya ditetapkan secara efektif.

12. Penerimaan dan keberlanjutan klien

Menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan prinsip pertimbangan kehati-hatian (*prudence*).

2.1.3 Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara manajemen dengan pihak luar perusahaan tentang data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2002) dalam PSAK NO.1 mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan apabila informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2* mengenai *Qualitative Characteristic OF Accounting Information*, terdapat dua hal yang menjadi kualitas primer dalam suatu laporan keuangan, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reliability*) (Kieso dan Weygandt, 1992).

Relevansi merujuk pada kemampuan informasi akuntansi untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan dengan mengubah atau membantu mengkonfirmasi harapan merek tentang hasil atau konsekuensi suatu tindakan/kejadian. Relevansi informasi dapat diukur dalam kaitannya dengan maksud penggunaan informasi tersebut. Artinya jika satu informasi tidak relevan

dengan kebutuhan pengambil keputusan, maka informasi akuntansi yang dapat diandalkan, yaitu informasi akuntansi yang bebas dari kesalahan dan penyimpangan serta merupakan suatu penyajian yang jujur

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* (Kieso, 2001) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. *Reliability* memiliki kualitas sebagai berikut:

a. Verifiability

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain, akan mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

b. Representational faithfulness

Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi.

c. Neutrality

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

Terkait dengan integritas laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi maka telah memenuhi dua karakteristik utama dalam suatu laporan keuangan. Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu

penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan.

Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Mulyadi (2004) mendefinisikan bahwa integritas adalah prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti adanya.”

Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun demikian secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba. Menurut Mayangsari (2003) laporan keuangan yang *reliable* atau berintegritas dapat dinilai dengan cara penggunaan prinsip konservatisme dan penggunaan *earning management* karena informasi dalam laporan keuangan akan lebih *reliable* apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak *overstate* supaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi dalam laporan keuangan tersebut.

2.1.3.1 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme biasanya didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (*prudent*) terhadap ketidakpastian, ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*). Basu sebagaimana dikutip oleh Almilia (2005) mengatakan bahwa

konservatisme merupakan praktek akuntansi dengan mengurangi laba (dan menurunkan nilai aktiva bersih) ketika menghadapi *badnews*, akan tetapi meningkatkan laba (dan menaikkan nilai aktiva bersih) ketika menghadapi *goodnews*. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan.

Konservatisme identik dengan laporan keuangan yang *understate* yang risikonya lebih kecil daripada laporan keuangan yang *overstate* sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih *reliable*, memenuhi kriteria karakteristik kualitatif informasi akuntansi sesuai dengan ketentuan SFAC No.2 (Widya, 2005). tentang “*Qualitative Characteristic of Accounting Information*”.

Konservatisme juga berarti bahwa akuntan harus mencatat nilai alternatif terendah untuk aset dan nilai alternatif tertinggi untuk kewajiban (Watts dan Zimmerman, 1986). Di dalam prinsip konservatisme, ketika terdapat dua atau lebih alternatif akuntansi yang memiliki kemampuan sama dalam memenuhi objektivitas dari laporan keuangan, maka yang dipilih adalah alternatif yang memiliki dampak yang paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas pemegang saham. Dengan demikian konsep ini mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi.

Holthausen dan Watts (2001) memberikan bukti yang menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi sudah ada sebelum penetapan standar formal dan

regulasi di Amerika Serikat. Penelitian Qiang (2003) juga membuktikan bahwa terdapat peningkatan kecenderungan perusahaan di Amerika untuk menerapkan konservatisme akuntansi secara sukarela. Widya (2005) mereplikasi penelitian Qiang (2003) dan menemukan bukti yang sama untuk Indonesia.

Munculnya praktik konservatisme tersebut karena standar akuntansi yang berlaku mengizinkan perusahaan memilih salah satu metode akuntansi yang dirasa paling tepat (Widya, 2005). Setiap metode akuntansi mempunyai tingkat konservatisme yang berbeda. Jamaan (2008) berpendapat bahwa perbedaan pemilihan metode akuntansi berpengaruh terhadap angka-angka yang disajikan baik dalam neraca maupun laporan laba-rugi perusahaan.

Pengukuran integritas laporan keuangan yang diproksikan dengan konservatisme dimana ditentukan menggunakan asumsi metode perusahaan yang digunakan yaitu metode persediaan, penyusutan, metode amortisasi, dan pengakuan biaya riset (Widya, 2005). Asumsi pertama yaitu perusahaan yang menggunakan metode persediaan rata-rata akan lebih konservatif dibandingkan dengan yang menggunakan metode FIFO. Dalam neraca fiskal hanya mengakui dua metode penilaian persediaan, yaitu FIFO (First In First Out) dan metode rata-rata tertimbang. Diantara kedua metode tersebut, metode rata-rata tertimbang dinilai sebagai metode yang paling konservatif karena menghasilkan biaya persediaan akhir yang lebih kecil sehingga harga pokok penjualan menjadi lebih besar dan laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil.

Asumsi kedua yaitu perusahaan yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun relatif lebih konservatif dibanding dengan perusahaan yang

menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan waktunya, jika periode penyusutan suatu perusahaan semakin pendek, maka akan lebih konservatif, dan sebaliknya (Dewi, 2004). Hal tersebut dikarenakan jika periode penyusutan semakin pendek, maka biaya penyusutan tiap periode menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Metode penyusutan saldo menurun dinilai lebih konservatif dibanding garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih besar sehingga menghasilkan laba yang lebih kecil.

Asumsi yang ketiga yaitu perusahaan yang menggunakan metode amortisasi saldo menurun relatif lebih konservatif dibanding dengan perusahaan yang menggunakan metode garis lurus. Sama halnya dengan penyusutan, semakin pendek periode amortisasi maka akan semakin konservatif dan sebaliknya. Metode amortisasi saldo menurun relatif lebih konservatif karena metode ini menghasilkan biaya amortisasi yang lebih besar sehingga menghasilkan laba yang lebih kecil.

Asumsi yang keempat yaitu perusahaan yang mengakui biaya riset dan pengembangan sebagai biaya pada tahun berjalan akan cenderung lebih konservatif dibanding perusahaan yang mengakui biaya riset dan pengembangan sebagai aktiva. Biaya riset dan pengembangan memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang lebih sesuai dengan keadaan perusahaan. Laporan keuangan akan menjadi lebih konservatif jika biaya riset dan pengembangan diakui sebagai beban daripada sebagai aktiva. Biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil sedangkan apabila diakui sebagai aktiva akan memperbesar laba yang dihasilkan.

2.1.4 *Audit Tenure* dan Integritas Laporan Keuangan

Audit tenure adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai *audit tenure* telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama 5 tahun berturut-turut.

Adanya kewajiban rotasi auditor memiliki kebaikan dan kelemahan. Rotasi auditor dapat meningkatkan kualitas audit dan independensi audit melalui suatu pengurangan pengaruh klien terhadap auditor. Kurangnya pengaruh memungkinkan terjadinya risiko kehilangan klien jika auditor tidak menyetujui pilihan pelaporan keuangan manajer (Farmer et al.,1987 dalam Adibowo, 2009).

Isu yang muncul akibat lamanya *audit tenure* adalah isu independensi auditor. Pada bulan Juli 2003, Federasi Akuntan Internasional (IFAC) mengeluarkan suatu dokumen *Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting*, dimana IFAC menganggap kekerabatan antara auditor dengan klien sebagai suatu ancaman bagi independensi auditor. Perhatian IFAC yang utama adalah kekerabatan yang berlebihan itu dapat mengakibatkan keragu-raguan atau kepuasan auditor untuk menghadapi tantangan sewajarnya. Dengan demikian, untuk mengurangi tingkatan keragu-raguan diperlukan suatu audit yang efektif (IFAC, 2003 dalam Adibowo, 2009). Louwers (1998) dalam Adibowo (2009) juga menemukan bahwa lamanya hubungan auditor-klien mempengaruhi kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini *going-concern*. Karenanya,

regulator menyatakan bahwa rotasi auditor dapat meningkatkan kualitas audit dan meningkatkan kualitas proses pelaporan keuangan (Chi dan Huang, 2004).

Beberapa kasus skandal akuntansi menyebutkan bahwa lamanya hubungan klien dan auditor menjadi penyebab kegagalan audit. Knapp (1991) menunjukkan bahwa lamanya hubungan antara klien dan auditor dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa auditor yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun serta kurang dari 5 tahun tidak dapat menemukan kesalahan pelaporan yang material. Metcalf Committee (US.Senate 1977) menyatakan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan klien dapat merusak kualitas profesionalisme kantor akuntan.

Hasil penelitian Knapp bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gosh dan Moon (2003) dalam Kusharyanti (2003) menghasilkan temuan bahwa kualitas audit meningkat dengan semakin lamanya *audit tenure*. Temuan ini menarik karena ternyata mendukung pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan audit antara auditor dengan klien berkurang. Selain itu, penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2003) yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara lamanya hubungan *auditor-auditee* dengan integritas laporan keuangan. Adapun penjelasan perbedaan beberapa penelitian hasil penelitian terdahulu dinyatakan sebagai berikut :

“Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Sebaliknya penugasan audit yang lama

kemungkinan dapat pula meningkatkan independensi karena akuntan publik sudah familiar, pekerjaandapat dilaksanakan dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan klien “ .

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 2002, menyatakan bahwa pada hubungan KAP-klien yang lebih panjang akan menjadi kurang tegas dalam pendekatan mereka dan suatu kesalahan (disengaja atau tidak disengaja) kemungkinan besar menjadi luput dari perhatian, dan rotasi KAP kemungkinan dapat meningkatkan efektifitas dan kualitas audit.

Dengan demikian, pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 yaitu masa jabatan yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Selain itu, pemberian jasa non audit tertentu, seperti menjadi konsultan pajak, konsultan manajemen, disamping pemberian jasa audit pada seorang klien tidak diperkenankan karena dapat mengganggu independensi auditor.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Badan regulator di beberapa negara termasuk di negara Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk membatasi masa perikatan auditor dengan klien.

Dengan adanya regulasi tersebut meningkatkan dan mempertahankan independensi, kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Pembatasan audit dirasa penting bagi kepentingan semua pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan sehingga pemerintah sebagai pihak regulator mengeluarkan peraturan tentang pembatasan audit.

2.1.5 Struktur *Corporate Governance* dan Integritas Laporan Keuangan

Penelitian yang menghubungkan struktur *corporate governance* dengan integritas laporan keuangan auditor memang belum pernah dilakukan. Walaupun demikian secara intuitif keterkaitan ini dapat dilihat dari fungsi beberapa komite yang merupakan bagian dari *corporate governance*. Komite yang dimaksud adalah komite audit serta keberadaan komisaris independen.

Menurut Griffin (2002) pengertian *corporate governance* adalah : “*The roles of shareholders, directors and other managers in corporate decision making.*” *Good governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Pada prinsipnya tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang berkepentingan.

Pemahaman atas *good governance* adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur (*good corporate governance*) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik /pemerintahan (*good government governance*). Pemahaman *good governance*

merupakan perwujudan terhadap sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas usaha.

Peraturan No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*good corporate governance*). Perusahaan tercatat wajib memiliki:

1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.
2. Komite Audit.
3. Sekretaris perusahaan.

Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran struktur *corporate governance* adalah:

2.1.5.1 Kepemilikan Institusional dan Integritas Laporan Keuangan

Menurut Gunarsih (2004) tingkat kepemilikan saham oleh manajerial yang cukup tinggi juga dapat berdampak buruk terhadap perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikannya yang tinggi, sehingga mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan. Akibatnya pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Fama dan Jensen (1983) serta Agrawal dan Mandeker (1990) dalam Listyani (2003) menganjurkan pentingnya suatu mekanisme pengawasan dalam perusahaan. Salah satu mekanisme

pengawasan tersebut yaitu dengan mengaktifkan *monitoring* melalui investor-investor institusional. Dengan kepemilikan institusional oleh perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain seperti perusahaan-perusahaan akan mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer. Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer sehingga integritas laporan keuangan terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan, dengan adanya pengawasan tersebut maka manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri. Mitra (2002), Koh (2003), dan Pratana dan Mas'ud (2003) juga menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba.

2.1.5.2 Kepemilikan Manajerial dan Integritas Laporan Keuangan

Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana & Herawaty, 2007). Kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan. Dua aspek penting dari struktur kepemilikan (Gunarsih, 2004) adalah konsentrasi kepemilikan dan komposisi kepemilikan.

Komposisi kepemilikan berkaitan dengan siapakah pemegang saham, dan yang lebih penting adalah siapa diantara pemegang saham ke dalam kelompok pengendali. Kepemilikan saham manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

Kepemilikan manajerial juga dapat berperan dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung bertindak dalam kepentingan pemegang saham karena mereka juga merupakan bagian dari pemegang saham, antara lain dengan tidak memanipulasi informasi yang ada dalam laporan keuangan.

2.1.5.3 Komite audit dan Integritas Laporan Keuangan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit.

Anggota komite yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite ini merupakan komisaris independen sekaligus ketua komite. Anggota lainnya yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Selain itu, terdapat berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit telah dibuat diantaranya:

- a. Pedoman Good Corporate Governance (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit;
- b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit;
- c. KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit;
- d. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit; dan
- e. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit;

Keberadaan komite audit pada saat ini diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu kehadiran komite audit akhir-akhir ini telah mendapat respon yang positif dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), Para Investor, Profesi Hukum (Advokat), Profesi Akuntan serta Independen Appraisal.

Klein (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual

diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Adanya kontribusi komite audit dalam kualitas pelaporan keuangan dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui dewan komisaris.

Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keandalan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan kantor akuntan publik, komite audit juga bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit adalah:

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor.

2.1.5.4 Komisaris independen dan Integritas Laporan Keuangan

Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang banyak digunakan untuk mengawasi manajer. Namun demikian, seringkali dewan komisaris tersebut belum bisa melaksanakan fungsi pengendalian terhadap direksi dengan baik. Salah satu sebabnya adalah banyak perusahaan di Indonesia yang

masih dikendalikan oleh pemegang saham pengendali, sehingga dewan komisaris gagal untuk mewakili kepentingan *stakeholder*-nya, selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas (Zaini (2002) dalam Kusuma dan Susanto (2004)). Kedua, pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada umumnya tidak efektif. Ini terjadi karena proses pemilihan dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen, sehingga setelah dipilih tidak berani memberi kritik terhadap manajemen (Mace (1986) dalam Kusuma dan Susanto (2004)).

Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governanace* (GCG) maka perlu dibentuk komisaris independen. Komisaris independen adalah sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen, sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk

melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi.

Dalam penelitian Mayangsari (2003) menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penemuan ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan. Ketidakkonsistenan hasil pengujian diduga karena masih cukup banyak emiten yang belum membentuk komisaris independen dan juga komite audit.

2.1.6 Ukuran KAP dan Integritas Laporan Keuangan

Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang.

KAP yang besar lebih independen dibandingkan dengan KAP yang kecil. Dengan alasan bahwa ketika KAP besar kehilangan satu klien tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatannya. Akan tetapi jika KAP kecil kehilangan satu klien sangat berarti karena kliennya sedikit (Shockley, 1981). Sehingga KAP besar seperti Big 4 biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan independensi auditor daripada KAP kecil. Selain itu, perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit tinggi dan memiliki reputasi

tinggi di lingkungan bisnis serta KAP yang lebih besar juga dianggap lebih mandiri dari KAP yang kecil dalam menahan tekanan manajemen jika terjadi perselisihan karena biasanya memiliki lebih banyak klien dan mampu mengatasi kesulitan.

Penelitian yang dilakukan Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan bahwa kualitas audit diukur dengan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Dalam penelitian tersebut KAP dibedakan menjadi KAP *big four* dan KAP *non-big four*. Lennox (1999) dalam Mayangsari (2003) menyatakan bahwa auditor kantor akuntan *big-eight* dan lebih akurat dibandingkan dengan KAP *non-big eight*. Dengan demikian semakin besar ukuran KAP semakin tinggi integritas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan KAP besar memiliki insentif untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Mayangsari (2003) memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara independensi, mekanisme *corporate governance*, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Variabel Independensi diproksikan dengan spektrum jasa KAP dan lamanya hubungan *auditor-auditee*; Mekanisme *corporate governance* diproksikan dengan presentase kepemilikan institusi, persentase kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen; Kualitas audit diproksikan dengan spesialisasi auditor; dan integritas laporan keuangan diukur dengan indeks konservatisme. Sampel dalam penelitian ini

adalah 148 perusahaan yang termasuk tidak teregulasi dari tahun 1998-2002. Analisis data yang digunakan adalah persamaan regresi berganda. Dari hasil penelitian Mayangsari (2003) ini hanya satu variabel yang memiliki nilai yang tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan, yaitu spektrum jasa KAP.

Penelitian oleh Widya (2005) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap akuntansi konservatif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme yang menggunakan model berdasar asumsi yang bersumber dari standar akuntansi keuangan (SAK) dengan kategori (1) untuk konservatif dan (0) untuk optimis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan, kontrak utang (*debt covenant*), kos politis (*political cost*), dan *growth*. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 1995-2002. Penelitian ini menemukan bahwa semakin besar konsentrasi struktur kepemilikan perusahaan terhadap modal dan semakin besar kos politis yang dikeluarkan perusahaan maka perusahaan semakin memilih akuntansi yang lebih konservatif selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa pada perusahaan yang konservatif identik dengan perusahaan yang tumbuh. Sedangkan untuk hipotesa kedua mengenai kontrak hutang ditolak, penelitian ini menduga karena adanya perilaku oportunistik perusahaan tidak dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama, selain itu penggunaan proksi *leverage* yaitu utang jangka panjang/total aset (Qiang, 2003) yang mengikuti penelitian Defond dan Jiambalvo (1994) dan Sweneey (1994) pada perusahaan yang bermasalah, sedangkan penelitian ini tidak dilakukan pada

perusahaan yang bermasalah, ini dibuktikan dengan pengambilan sampel dengan kriteria perusahaan harus terdaftar selama 8 tahun berturut-turut.

Penelitian oleh Susiana dan Arleen Herawati (2007) meneliti hubungan Independensi, Mekanisme *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan public (2000-2003) dan hanya perusahaan teregulasi. Hasil dari penelitian ini adalah Independensi yang diukur dengan fee audit tidak berpengaruh signifikan pada tahun 2000-2002 sedangkan pada tahun 2003 berpengaruh. *Corporate Governance* yang diukur dengan keberadaan komite audit dan komisaris independen serta kepemilikan saham institusi dan manajemen tahun 2000-2001 berpengaruh signifikan tetapi tahun 2002-2003 tidak signifikan. Kualitas audit tidak berpengaruh. Penelitian menghasilkan hasil tidak signifikan karena sampel tidak terdistribusi normal.

Penelitian yang dilakukan oleh Jama'an (2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance*, dan kualitas kantor akuntan publik terhadap integritas informasi laporan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur tahun 2003-2006. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan. Variabel dependennya mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas kualitas kantor akuntan publik. Hasil penelitian menemukan pengaruh antara mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris

independen dan komite audit) serta kualitas kantor akuntan public menunjukkan hasil yang positif signifikan.

Beberapa perbedaan penelitian tentang *audit tenure*, struktur *corporate governance* dan Ukuran KAP disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mayangsari (2003)	Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan diukur dengan indeks Konservatisme. Variabel Independen: Independensi diproksikan dengan spektrum jasa KAP dan lamanya hubungan <i>auditor-auditee</i> ; Mekanisme <i>corporate governance</i> diproksikan dengan presentase kepemilikan institusi, persentase kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen; Kualitas audit diproksikan dengan spesialisasi auditor. Sampel dan populasi : perusahaan publik periode 1998-2001	Dalam penelitian ini menemukan adanya hubungan negatif antara komite audit dengan integritas laporan keuangan. Keberadaan komite audit dianggap kurang efektif terkait dalam peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
2	Widya (2005)	Variabel dependen : Konservatisme Variabel independen: Struktur kepemilikan, Kontrak utang, Kos politis, <i>Growth</i> Sampel dan populasi : Perusahaan manufaktur periode 1995-2002	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menemukan bahwa semakin besar konsentrasi struktur kepemilikan perusahaan terhadap modal, semakin memilih akuntansi yang lebih konservatif. • Semakin besar kos politis yang dikeluarkan perusahaan maka

			<p>perusahaan semakin memilih akuntansi yang lebih konservatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini juga membuktikan bahwa pada perusahaan yang konservatif identik dengan perusahaan yang tumbuh. • Untuk hipotesa kedua mengenai kontrak utang ditolak, hal ini disebabkan karena perilaku oportunistik perusahaan tidak dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama, selain itu penggunaan proksi <i>leverage</i> yaitu utang jangka panjang/total aset (Qiang, 2003) yang mengikuti penelitian Defond dan Jiambalvo (1994) dan Sweneey (1994) pada perusahaan yang bermasalah, sedangkan penelitian ini tidak dilakukan pada perusahaan yang bermasalah, ini dibuktikan dengan pengambilan sampel dengan kriteria perusahaan harus terdaftar selama 8 tahun berturut-turut
3	Susiana dan herawaty (2007)	<p>Variabel dependen : Integritas laporan keuangan diukur dengan indeks Konservatisme.</p> <p>Variabel independen : independensi; mekanisme corporate governance diproksikan dengan presentase kepemilikan institusi, persentase kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen; kualitas audit.</p> <p>Sampel dan populasi : perusahaan public 2003-2006</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan hasil bahwa independensi auditor, mekanisme corporate governance dan kualitas audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.</p>

4.	Jama'an (2008)	Variabel dependen : Integritas laporan keuangan. Variabel indenpenden : Mekanisme <i>corporate governance</i> (kepemilikan institusional, komite audit, komsisaris independen) dan kualitas kantor akuntan public Sampel dan populasi : Perusahaan manufaktur 2003-2006	Hasil penelitian menemukan pengaruh antara mekanisme <i>corporate governance</i> (kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit) serta kualitas kantor akuntan public menunjukkan hasil yang positif signifikan.
----	----------------	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan mengeluarkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak. Dengan kata lain, laporan keuangan harus disajikan dengan integritas yang tinggi.

Pada kenyataannya, kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi telah meningkat beberapa tahun ini terakhir ini, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan. Timbulnya kasus-kasus tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan bagi banyak pihak. Beberapa diantaranya adalah mengenai *audit tenure*, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan ukuran KAP.

Penelitian oleh Mayangsari (2003) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara lamanya hubungan *auditor-auditee* dengan integritas laporan

keuangan. Dengan demikian, semakin lama hubungan *auditor-auditee* maka semakin tinggi integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan akuntan publik sudah familiar, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan klien sehingga dapat meningkatkan independensi auditor dan kualitas audit yang disajikan.

Penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Penerapan tata kelola yang baik dapat menghasilkan integritas laporan keuangan yang terpercaya. Struktur *corporate governance* diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen.

Adanya kepemilikan institusional, sebagai salah satu pengukuran struktur *corporate governance*, memiliki tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi dimana terdapat kekuasaan tunggal suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang disajikan. Sedangkan kepemilikan manajemen berfungsi sebagai penyeimbang dalam kepemilikan saham. Adanya keikutsertaan manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat memotivasi manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat tercapai kinerja perusahaan yang diharapkan dan meningkatkan integritas laporan keuangan.

Integritas laporan keuangan sebuah perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh adanya komite audit, komisaris independen dalam perusahaan. Komite audit bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan lebih jujur sehingga integritas laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya. Sedangkan komisaris independen

bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan terutama untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Perusahaan yang memiliki komisaris independen cenderung akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berintegritas karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan.

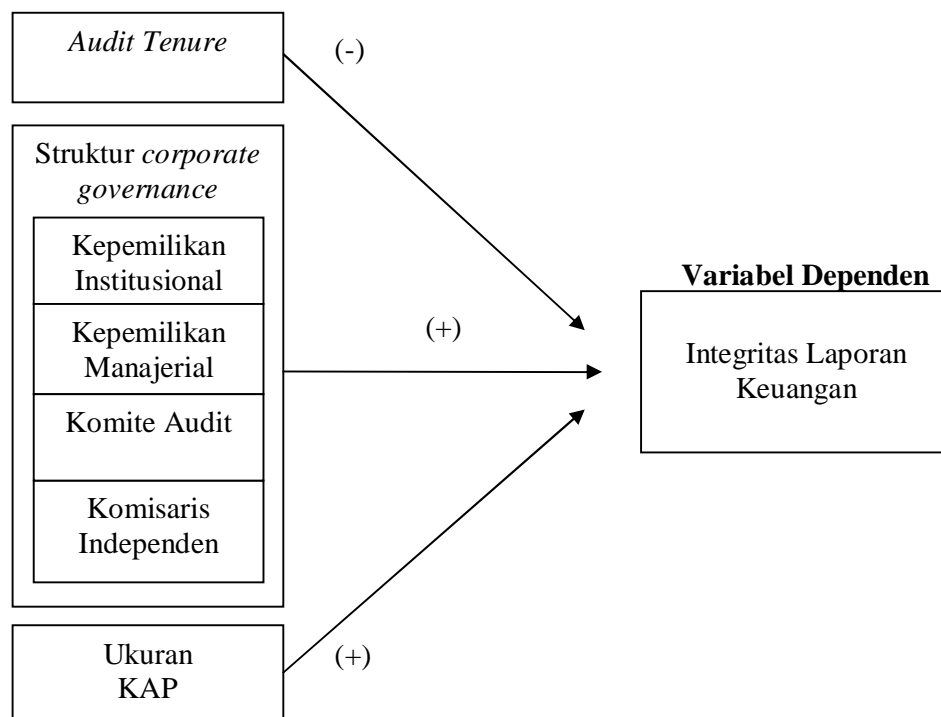
Untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, perusahaan diharapkan menggunakan jasa ukuran/tipe KAP besar seperti *big four* biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan independensi auditor daripada KAP kecil seperti *non-big four*. Selain itu, perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit tinggi yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi kepentingan banyak pihak, sehingga dapat menghasilkan jasa audit yang lebih baik dan memiliki reputasi tinggi di lingkungan bisnis serta KAP yang lebih besar juga dianggap lebih mandiri dari KAP yang kecil dalam menahan tekanan manajemen jika terjadi perselisihan karena biasanya memiliki lebih banyak klien dan mampu mengatasi kesulitan yang dialami oleh klien.

Hubungan auditor dengan klien (*audit tenure*), struktur *corporate governance*, dan ukuran KAP dengan integritas laporan keuangan dapat ditunjukkan dengan kerangka pemikiran teoritis yang disajikan dalam gambar 2.2 dibawah ini:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

**Hubungan *Audit Tenure*, Struktur *Corporate Governance*,
Dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Variabel Independen



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Integritas Laporan Keuangan

Audit tenure adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai audit tenure telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

359/KMK.06/2003 pasal 2 yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama 5 tahun berturut-turut.

Isu yang muncul akibat lamanya *audit tenure* adalah isu independensi auditor. Knapp (1991) menunjukkan bahwa lamanya hubungan antara auditee dengan auditor dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan. Dalam hubungan auditor-klien terdapat tendensi bahwa seiring dengan perjalanan waktu, auditor secara berangsur menyesuaikan dengan berbagai keinginan manajemen dan kemudian tidak bertindak sepenuhnya independen. Mautz dan Sharaf (1961) dalam Myers (2003) menyatakan bahwa semakin lamanya hubungan relasi antara KAP-klien dapat mempunyai pengaruh yang merugikan pada independensi KAP karena obyektifitas KAP pada klien akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu.

Dugaan rusaknya independensi auditor disebabkan karena masa kerja auditor dan klien menyebabkan pada beberapa negara, termasuk Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan rotasi yang sifatnya *mandatory*. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H1 : *Audit tenure* berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Gideon (2005) persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan monitoring terhadap perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan (Gunarsih, 2004). Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

Kepemilikan manajerial berperan dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan demikian, manajer pada perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial akan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang benar dan jujur sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan integritas laporan keuangan.

2.4.4 Pengaruh Komite audit terhadap signifikan terhadap integritas laporan keuangan

Dalam penyelenggaraan *good corporate governance*, berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite ini merupakan komisaris independen sekaligus ketua komite. Anggota lainnya yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen dan sekurang-kurangnya salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

Dengan demikian komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan

keuangan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian adalah:

H4 : Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.4.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luar dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dapat disimpulkan keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak-hak diluar perusahaan.

Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian adalah:

H5 : Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.4.6 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan

Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di pihak eksternal sebagai pemakai laporan keuangan. Lennox (1999) dalam Mayangsari (2003) menyatakan bahwa auditor dari akuntan *big-eight* lebih akurat dibandingkan auditor dari akuntan *non-big eight*. Hal ini menunjukkan bahwa kantor akuntan besar mempunyai reputasi yang lebih baik dalam opini publik.

Dengan demikian semakin besar ukuran KAP maka integritas laporan keuangan perusahaan yang diaudit juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil (DeAngelo (1981). Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian adalah:

H6 : Ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian (pengujian hipotesis) ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan, sedangkan variabel independennya adalah *audit tenure*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan. Mayangsari (2003) mendefinisikan integritas laporan keuangan sebagai sejauh mana laporan keuangan yang disajikan dapat menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Informasi yang ditampilkan menunjukkan kondisi suatu perusahaan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan.

Dalam penelitian ini integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan konservatisme. Alasan untuk menggunakan konservatisme sebagai proxy integritas laporan keuangan adalah konservatisme identik dengan laporan keuangan yang *understate* yang risikonya lebih kecil daripada laporan keuangan yang *overstate* sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih reliable, memenuhi kriteria karakteristik kualitatif informasi akuntansi sesuai dengan

ketentuan SFAC No.2 (Widya, 2005). Konservatisme dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal yaitu (1) konservatif dan (0) optimis. Pengukuran konservatisme dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan asumsi yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Widya (2005). Asumsi yang dikemukakan antara lain :

- a. Perusahaan yang menggunakan metode persediaan rata-rata akan lebih konservatif dibandingkan dengan yang menggunakan metode FIFO.
- b. Perusahaan yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun relatif lebih konservatif dibanding dengan perusahaan yang menggunakan metode garis lurus.
- c. Perusahaan yang menggunakan metode amortisasi saldo menurun relatif lebih konservatif dibanding dengan perusahaan yang menggunakan metode garis lurus.
- d. Perusahaan yang mengakui biaya riset sebagai biaya pada tahun berjalan akan cenderung lebih konservatif dibanding perusahaan yang mengakui biaya riset sebagai aktiva.

Dari keempat asumsi diatas dapat disimpulkan, jika perusahaan memenuhi empat, tiga, atau dua asumsi diatas, maka perusahaan tersebut digolongkan konservatif (1). Jika perusahaan hanya memenuhi satu atau tidak memenuhi satu pun dari asumsi di atas maka perusahaan tersebut digolongkan optimis (0).

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.1.2.1 Audit Tenure

Audit tenure adalah masa perikatan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai *audit tenure* telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2008 pasal 3 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2. Variabel *audit tenure* dihitung dengan menjumlah total panjang masa perikatan audit sebelum auditor berpindah. Variabel ini diberi simbol TENURE.

3.1.2.2 Struktur Corporate Governance

Struktur *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*-nya (Sulistyanto dan Prapti, 2003). Variabel ini merupakan variabel yang tidak diukur secara mandiri tetapi diukur dengan menggunakan empat dimensi variabel, yaitu :

1. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan iklim independen, lebih objektif, dan menerapkan unsur keadilan. Komisaris independen bertugas agar komisaris secara umum proaktif dalam melakukan pengawasan dan penasehat direksi, sehingga secara tidak langsung berperan dalam menyediakan laporan keuangan yang realibel. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan yang dilakukan manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.

Secara teoritis keberadaan dewan ini akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Komisaris Independen diberi symbol KI dan diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen) dengan total anggota dewan komisaris.

2. Komite audit

Komite audit mempunyai fungsi untuk membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya manajemen laba maupun penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan yang dapat dilakukan oleh manajer. Komite audit juga dapat meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Komite audit diberi simbol KA dan diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit yang terdapat dalam perusahaan.

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan dibandingkan dengan total jumlah saham yang beredar. Kepemilikan manajerial diberi symbol MANJ dan diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer, direksi, komisaris, ataupun pihak-pihak lain yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (komisaris dan direksi).

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional yang tinggi akan menghasilkan pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistik manajer. Variabel ini diberi symbol INST yaitu proporsi saham yang dimiliki oleh institusional atau suatu institusi pada akhir tahun dibandingkan dengan total jumlah saham yang beredar. Institusi yang dimaksud dalam hal ini misalnya perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Variabel kepemilikan institusional ini diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh institusi.

3.1.2.3 Ukuran KAP

KAP (Kantor Akuntan Publik) besar seperti big 4 biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan independensi auditor daripada KAP kecil karena mereka menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Dopuch, 1984; Wilson dan Grimplund, 1990). Selain itu, perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit tinggi dan memiliki reputasi tinggi di lingkungan bisnis dan oleh karena itu berusaha untuk mempertahankan independensi dan menjaga *image* mereka.

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan perbedaan besar kecilnya KAP, dimana ukuran KAP dibagi menjadi dua yaitu KAP besar (Big 4) dan KAP kecil (non Big 4). Variabel ukuran KAP ini menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan klien diaudit oleh KAP besar (big 4), maka akan diberikan nilai 1.

Tetapi jika perusahaan klien diaudit oleh KAP kecil (non Big 4), maka akan diberikan nilai 0. Variabel ini diberi symbol KAP.

Adapun auditor yang termasuk dalam kelompok KAP Big 4 di Indonesia yaitu:

- a) *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.
- b) *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
- c) *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta Siddharta & Widjaja.
- d) *PricewaterhouseCoopers* (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari &Rekan.

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2007-2009. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar selama periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009. Pemilihan sampel berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu (Nur dan Bambang, 2002) :

- a. Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI yang dapat diakses baik melalui pojok BEJ Universitas Diponegoro maupun internet dan melaporkan laporan keuangan yang mencantumkan selama tahun 2007-2009.
- b. Perusahaan yang memiliki data keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap.
- c. Perusahaan manufaktur tersebut tidak dalam keadaan rugi selama tahun 2007-2009.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dari tahun 2007 sampai 2009 yang telah dipublikasikan dan tersedia di database pojok BEJ UNDIP serta data *floor announcement* dari BEI yang dapat didownload dari website IDX (Indonesia Stock Exchange).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, serta melihat dan mengambil data-data yang diperoleh dari laporan keuangan yang disampaikan Bursa Efek Indonesia (dalam hal ini diperoleh dari pojok BEI UNDIP), dan dari *floor announcement*

dari Bursa Efek Indonesia yang dapat di download dari website IDX (Indonesia Stock Exchange).

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan serta variabel independen *audit tenure*, struktur *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi komite audit, komposisi komisaris independen), dan ukuran KAP pada perusahaan manufaktur tahun 2007-2009.

Analisis ini disajikan dengan menggunakan tabel *statistic descriptive* yang memaparkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*). *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai disperse rata-rata dari sampel. Maksimum dan nilai minimum digunakan untuk melihat nilai maksimum dan minimum dari populasi. Hal ini perlu

dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

3.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2007). Multikolinieritas terjadi dalam analisis regresi logistik apabila antar variabel independen saling berkorelasi. Dalam Ghozali (2006) multikolinieritas dapat dilihat dari :

- Nilai *tolerance* dan lawannya
- *Variance Inflation Factor* (VIF)

Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2007). Apabila terjadi gejala multikolinieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang baik.

3.5.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan logistic regresion karena variabel dependennya berupa variabel dummy (non-metrik) dan variabel independennya berupa gabungan antara variabel metrik dan non-metrik sehingga tidak perlu lagi menggunakan uji normalitas dan uji asumsi klasik (Ghozali, 2007). Model yang digunakan adalah :

$$\text{Ln } p/1-p = \text{CON}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{TENURE}_{it} + \beta_2 \text{INST}_{it} + \beta_3 \text{MANJ}_{it} + \beta_4 \text{KA}_{it} + \beta_5 \text{KI}_{it} + \beta_6 \text{KAP}_{it} +$$

Dimana :

CON = Ukuran integritas laporan keuangan yang diukur menggunakan variabel dummy dari asumsi konservatisme.

TENURE = Masa kerja, lamanya hubungan *auditor-auditee* sebelum auditor berpindah.

INST = Persentase kepemilikan saham oleh institusi.

MANJ = Persentase kepemilikan saham oleh manajemen.

KA = Jumlah anggota komite audit perusahaan.

KI = Proporsi komisaris independen terhadap keseluruhan jumlah dewan komisaris perusahaan.

KAP = Ukuran KAP, variabel ini menggunakan variabel dummy dan diberi nilai 1 jika KAP merupakan KAP big four dan nilai 0 untuk KAP non big four.

E = error

3.5.4 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Dalam penelitian ini pertama kali akan dilakukan penilaian terhadap keseluruhan model fit terhadap data. Beberapa tes statistik digunakan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai model ini adalah (Ghozali, 2007) :

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

Dari hipotesis tersebut hipotesis nol harus ditolak agar model fit dengan data. Statistik yang digunakan menggunakan statistik *Likelihood*. *Likelihood* L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi $-2 \text{ Log Likelihood}$ atau $-2LL$. Statistik $-2LL$ disebut juga *Likelihood* rasio χ^2 statistik, dimana χ^2 didistribusikan dengan *degree of freedom* $n-q$. Q adalah jumlah parameter dalam model. Model akan fit dengan data jika $-2LL$ yang kedua tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$. (Ghozali, 2007).

Dalam penelitian ini akan menggunakan *Cox and Snell R Square* serta *Nagelkerke R Square* untuk menilai model fit. *Cox and Snell R Square* dan *Nagelkerke R Square* merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R^2 dalam *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *Likelihood*. *Nagelkerke R Square* lebih mudah diinterpretasikan daripada *Cox and Snell R Square* sehingga untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dapat dilihat dari nilai *Nagelkerke R Square*. (Ghozali, 2007).

3.5.5 Menilai Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Kelayakan model regresi dinilai menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. (Ghozali, 2007). *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Keputusan model ini, (Ghozali, 2007) :

1. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness of fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasi.
2. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak. Ini berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima.

3.5.6 Estimasi Parameter dan Interpretasinya.

Untuk menilai hasil analisis regresi penelitian ini menggunakan model persamaan yang memasukkan semua komponen dari variabel independen, yang dapat dilihat dari *Variabel in The Equation* (Ghozali, 2007)